

SKRIPSI

**E-READINESS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
DALAM IMPLEMENTASI E-KINERJA**

**SANDY SUMITOMO
E011211024**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK DEPARTEMEN ILMU
ADMINISTRASI PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

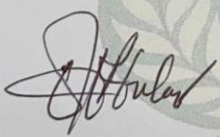
Nama : Sandy Sumitomo
NIM : E011211024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : E-Readiness Pengadilan Agama Sungguminasa
Kelas IB Dalam Implementasi E-Kinerja


Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi,
Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin.

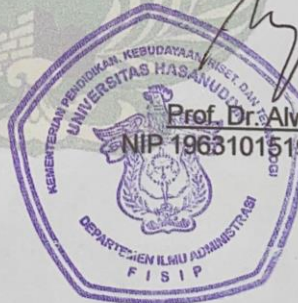
Makassar, 19 Agustus 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu
Administrasi,


Dr. Syahribulan, M.Si
NIP 196009141987022001


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 196310151989031006



**E-READINESS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
DALAM IMPLEMENTASI E-KINERJA**

**SANDY SUMITOMO
E011211024**

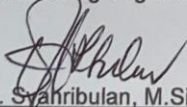
Skripsi,

ah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 11 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada




**Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar**

Menyetujui:
Pembimbing Tugas Akhir,


Dr. Syahribulan, M.Si
NIP 196009141987022001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Awi, M.Si
NIP 196310151989031006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "E-Readiness Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Dalam Implementasi E-Kinerja" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Syahribulan, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 September 2024



Sandy Sumitomo
NIM E011211024

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang dilakukan berhasil terlaksana, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan atas berkat dan kehendak Tuhan Yesus Kristus, serta berkat bimbingan, diskusi, dan arahan dari Bapak Prof. Dr. Alwi, M.Si dan Ibu Dr. Syahribulan, M. Si selaku pembimbing, Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si, Bapak Drs. Nelman Edy, M. Si serta Kak Nuralamsyah Ismail, S.Sos. MA selaku penguji. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga ingin penulis sampaikan kepada Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I., Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, serta kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah menerima penulis dengan sangat ramah. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, serta seluruh dosen di Departemen Ilmu Administrasi yang tanpa terkecuali telah memberikan fasilitas dalam menyelesaikan perjalanan studi sarjana dan penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang penuh dengan rasa tulus ingin penulis sampaikan kepada kedua orang tua terkasih, Bapak Halim dan Ibu Patricia Nelly Carina, serta saudari saya, Regina Halim. Dukungan mereka yang tak pernah lelah, doa yang tak henti mengalir, semangat yang membangkitkan, dan motivasi yang menggelora telah menjadi tiang penopang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, melewati setiap tantangan dengan penuh keyakinan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekolah yang memberikan semangat dan dukungan yang tak tergantikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Dan kepada teman-teman seperjuangan penulis, terima kasih atas kehadiran mereka, dan bantuan tulus yang telah mereka berikan.

Tak hanya itu, penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada teman-teman dari ASF Boys atas dukungan dalam penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada teman-teman dari KKNT 111 Tanjonga atas kisah inspiratif, pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan, serta bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan. Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LEGION 2021 dan VIVA PHILIA 2021 atas momen kebersamaan yang tak terlupakan, serta pembelajaran yang sangat berarti sepanjang perjalanan penulis menjadi mahasiswa dan kepada Humanis FISIP Unhas, PMKO FISIP Unhas, serta UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP Unhas, terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan sepanjang perjalanan akademis penulis. Akhirnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua individu yang turut serta, memberikan bantuan, dan merayakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi berkah yang melimpah bagi kita semua.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan topik penelitian yang dibahas. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi studi-studi selanjutnya dan memberikan kontribusi

positif dalam bidang ilmu yang relevan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan yang mungkin tidak dapat dihindari. Untuk itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan tersebut dan sangat menghargai setiap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis,

Sandy Sumitomo

ABSTRAK

Sandy Sumitomo “E-Readiness Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Dalam Implementasi E-Kinerja (Dibimbing oleh Dr. Syahribulan, M. Si)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam mengimplementasikan aplikasi E-Kinerja menggunakan Framework STOPE yang terdiri dari lima indikator. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital yang semakin berkembang, khususnya di sektor pemerintahan yang membutuhkan evaluasi kinerja yang akurat dan efisien. Fenomena yang dihadapi adalah perlunya organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam manajemen kinerja, yang memerlukan perubahan pada sistem dan prosedur kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Framework STOPE, yang mencakup lima elemen utama: Strategi, Teknologi, Organisasi, Manusia, dan Lingkungan, dengan tiga kategori untuk mengukur tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi sistem E-Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB siap dalam mengimplementasikan aplikasi E kinerja. Mulai dari merancang strategi evaluasi kinerja yang relevan dan berkala, dengan penggunaan teknologi seperti alat tulis, scanner, komputer, dan printer untuk mendukung efisiensi pemrosesan data juga fleksibilitas struktur birokrasi yang mendukung, serta keterampilan pegawai dalam penggunaan aplikasi E-Kinerja, Lalu pengendalian birokrasi yang sistematis dan ketat juga mendukung transformasi digital.

Kata kunci: Aplikasi E-Kinerja, Tingkat kesiapan, Strategi, Teknologi, Organisasi, Manusia, Lingkungan

ABSTRACT

Sandy Sumitomo “E-Readiness of the Sungguminasa Class IB Religious Court in the Implementation of E-Kinerja (Supervised by Dr. Syahribulan, M. Si)”

This study aims to analyze and describe the readiness of the Sungguminasa Class IB Religious Court in implementing the E-Kinerja application using the STOPE Framework which consists of five indicators. The urgency of this research lies in the importance of organizational readiness in facing the growing digital transformation, especially in the government sector which requires accurate and efficient performance evaluation. The phenomenon faced is the need for organizations to adapt to technological developments in performance management, which requires changes to work systems and procedures. This research uses the STOPE Framework theory approach, which includes five main elements: Strategy, Technology, Organization, People, and Environment, with three categories to measure the level of organizational readiness in the implementation of the E-Kinerja system. The results showed that the Sungguminasa Class IB Religious Court is ready to implement the E-performance application. Starting from designing a relevant and periodic performance evaluation strategy, with the use of technology such as stationery, scanners, computers, and printers to support data processing efficiency as well as the flexibility of a supportive bureaucratic structure, as well as employee skills in using the E-Kinerja application, then systematic and strict bureaucratic control also supports digital transformation.

Keywords: E-performance Application, E-Readiness, Strategy, Technology, Organization, People, Environment

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tinjauan Teori.....	4
I.3 Tujuan dan Manfaat	9
I.3.1 Tujuan	9
I.3.2 Manfaat	10
BAB II.....	11
METODE PENELITIAN.....	11
II.1 Pendekatan Penelitian	11
II.1.1 Fokus Penelitian.....	11
II.2 Desain Penelitian	12
II.3 Prosedur Penelitian.....	12
II.3.1 Penentuan Informan.....	12
II.3.2 Teknik Pengumpulan Data	13
II.3.3 Teknik Analisis Data.....	13
II.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data.....	14
BAB III.....	15
HASIL DAN PEMBAHASAN	15
III.1 Strategi.....	15
III.1.1 Strategi Pelaksanaan Aplikasi E-Kinerja	16
III.1.2 Pengembangan Strategi Pelaksanaan Aplikasi E-Kinerja.....	17
III.2 Teknologi	19
III.2.1 Infrastruktur Teknis Aplikasi E-Kinerja	20

III.2.2 Sistem Informasi Aplikasi E-Kinerja	21
III.3 Organisasi.....	22
III.3.1 Struktur Birokrasi Adaptif	23
III.3.2 Kultur Kerja	24
III.4 Manusia	26
III.4.1 Keterampilan Pegawai	27
III.4.2 Pengembangan Pegawai	28
III.5 Lingkungan	30
III.5.1 Budaya Birokrasi	30
III.5.2 Transformasi Digital Budaya Birokrasi	32
BAB IV	35
PENUTUP.....	35
IV.1 Kesimpulan.....	35
IV.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Kerangka Pikir Penelitian	9
Gambar. 2 Struktur Organisasi	12

DAFTAR LAMPIRAN

BIODATA	39
DAFTAR NAMA INFORMAN	40
LOGBOOK PENELITIAN	41
DOKUMENTASI.....	44
SURAT IZIN MENELITI	46
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	47

DAFTAR ISTILAH

Istilah, Singkatan	Arti dan Penjelasan
E-Readiness	Tingkat kesiapan suatu organisasi, individu, atau negara untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai hasil yang optimal.
E-Government	Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik secara online, meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, partisipasi publik, dan inklusi digital.
E-kinerja	Aplikasi berbasis web untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan, dan beban kerja unit atau satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja.
Framework	Kerangka kerja atau struktur konseptual yang digunakan untuk memahami, mengelola, atau mengimplementasikan suatu sistem atau konsep.
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ASN	Aparatur Sipil Negara
BKN	Badan Kepegawaian Negara
TPP	Tambahan Penghasilan Pegawai
SKP	Sasaran Kinerja Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

E-Readiness adalah tingkat kesiapan suatu organisasi, individu, atau negara untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai hasil yang optimal (Bowles 2011), konsep ini memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi E-Government, karena tingkat kesiapan yang berbeda-beda dapat memberikan dampak yang berbeda pula terhadap implementasi E-Government. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di JL. Mesjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan. Somba Opu, Kabupaten Gowa merupakan contoh nyata dalam sektor publik. Mereka mulai menerapkan sistem E-Kinerja pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN). E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan, dan beban kerja unit atau satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja (Putri 2014).

Penilaian kinerja dilakukan dalam siklus singkat dan lengkap berdasarkan data yang terukur, termasuk evaluasi kinerja yang diberikan dan kompensasi yang sesuai. Dalam konteks ini, aplikasi E-Kinerja menjadi sarana utama untuk mendukung pengelolaan kinerja pegawai. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan kontinu terhadap kinerja karyawan sesuai dengan pedoman pemerintah dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Karenanya, penerimaan aplikasi E-Kinerja oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB bukan sekadar langkah menuju efisiensi dan efektivitas, tetapi juga implementasi yang selaras dengan kebijakan nasional dalam pengelolaan aparatur sipil negara.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal E- kinerja seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan ini mengatur penilaian kinerja pegawai negeri sipil, termasuk penggunaan E-Kinerja dalam proses penilaian. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, menyajikan pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN yang optimal, dengan tujuan mengubah cara kerja pemerintahan menjadi lebih agile dan fokus pada hasil.

Peraturan lain seperti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11 Tahun 2023 tentang penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja, peraturan ini mengatur penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja, termasuk pengelolaan kinerja pegawai ASN, percepatan layanan kepegawaian, dan dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 yang menjelaskan cara penggunaan aplikasi E-Kinerja, termasuk cara login, sinkronisasi profil, input periodisasi SKP, dan pengisian detail SKP, serta mengajukan SKP. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja pegawai.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti penelitian yang dilakukan oleh Rini Mayasa, Nono Heryana dan Agustia Hananto (2023), hasil penelitiannya menemukan bahwa pemerintah desa memiliki kesiapan yang baik dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada mendukung adopsi teknologi secara menyeluruh dalam pelayanan publik dengan nilai siap (3) skala 4. Relevansi penelitian ini menggunakan kerangka STOPE mengevaluasi kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan inisiatif E-Government, juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode pengukuran dengan Skala dari 5 Domain yang dinilai terdapat 3 domain yang mendapatkan predikat Sangat Siap dan 2 domain yang mendapat predikat Siap.

Sudesh Sheoran, Sanket Vij (2022), hasil penelitiannya menemukan peningkatan kesiapan elektronik negara memerlukan alokasi sumber daya yang optimal. Namun, penerapan E-Government dihadapkan pada tantangan infrastruktur TI, aksesibilitas TIK, keterampilan elektronik pemangku kepentingan, serta sikap negatif masyarakat dan kebijakan hukum. Faktor-faktor seperti validasi biaya, makro ekonomi, budaya, visi dan tujuan, serta potensi tantangan juga penting dalam mengukur kesiapan elektronik suatu negara. Relevansi penelitian ini, secara singkat meninjau literatur E-Government yang berfokus pada kesiapan elektronik, adopsi. Perbedaannya penelitian ini menggunakan eGov-MM (eGovernment Maturity Model) dari Iribarren dkk (2008) untuk mengevaluasi kapabilitas dan kematangan organisasi pemerintah dengan kriteria informasi, sumber daya TI, dan domain leverage.

Rossi Adi Nugroho, Yuyun Purbokusumo (2020) hasil penelitian ini menemukan penilaian E-Readiness di Kementerian Kominfo menunjukkan kesiapan yang cukup, namun masih terdapat kendala seperti alokasi anggaran yang terbatas dan kurangnya komitmen pimpinan. Perbaikan diperlukan dalam peningkatan anggaran untuk pengembangan SDM dan teknologi, serta pembentukan regulasi yang lebih jelas. Relevansi penelitian ini analisis dan pengolahan data serta penilaian dan identifikasi kesiapan obyek penelitian dengan menggunakan STOPE yang dimodifikasi. Perbedaan Penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner dan metode pengukuran (skala bertingkat), yang berisi sejumlah pertanyaan yang diserahkan kepada responden.

Hesti Ekawati, I Ketut Adi Purnawan, dan I Putu Agus Eka Pratama (2019), hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti Self Efficacy, Kurangnya Waktu, dan Kompleksitas memengaruhi pemanfaatan E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Mayoritas karyawan merespons positif terhadap sistem E-Government, dengan banyak dari mereka merasa nyaman, percaya diri, dan melihat manfaat yang signifikan dalam penggunaannya. Relevansinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam menggunakan sistem E-Government. Perbedaan penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari (Davis 1996) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Anton Susanto (2011) hasil penelitian ini menunjukkan kesiapan yang cukup dalam masyarakat Desa Terong untuk mengadopsi teknologi. Penggunaan teknologi mobile phone dan internet memberikan peluang baru dalam pemasaran dan interaksi bisnis di tingkat desa. Relevansi penelitian ini mencoba untuk mengukur E-readiness di

di Desa Terong dalam pengembangan desa berbasis teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini menggunakan teori Wisnujaya dan Surendro (2006) dengan analisis terhadap E-Government Readiness pada sudut pandang pemerintah (Government E-readiness) dengan faktor-faktor meliputi E-leadership, Culture, Human resources, E-governance, ICT infrastructure, Business climate.

Aplikasi E-kinerja merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembuatan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan pencapaian SKP secara efisien melalui proses penilaian prestasi kinerja yang dilakukan secara online. Inovasi ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah. Aplikasi ini tidak hanya dirancang untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN, tetapi juga untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah terkait penilaian prestasi kerja, izin kerja, dan pengelolaan keuangan yang ketat. Penerapan Aplikasi E-Kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB menegaskan pentingnya tingkat kesiapan atau E-readiness dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan potensi penuh teknologi informasi. Meskipun memberikan manfaat signifikan, seperti peningkatan efisiensi dan transparansi, penerapan aplikasi E-Kinerja dihadapkan pada sejumlah hambatan yang menunjukkan perlunya peningkatan tingkat kesiapan.

Tantangan seperti kesalahan input data Perjanjian Kinerja Pegawai (PKP), kesulitan dalam menggunakan menu angka kredit, dan gangguan teknis pada server menyoroti pentingnya infrastruktur yang handal dan pengelolaan yang efektif terhadap perangkat lunak. Masalah ini tidak hanya menekankan perlunya pemahaman teknis yang mendalam tetapi juga mendemonstrasikan perlunya dukungan yang kuat dari sisi manajemen dan kebijakan untuk menjamin operasional yang lancar dan efisien. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya investasi lebih lanjut dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi teknologi bagi pegawai. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dapat memaksimalkan potensi aplikasi E-Kinerja untuk mencapai tujuan pengelolaan kinerja pegawai yang lebih efektif, sesuai dengan standar dan kebijakan nasional yang berlaku.

Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi pegawai agar dapat mengintegrasikan teknologi ini secara efektif dalam pekerjaan sehari-hari. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi E-Kinerja, tetapi juga memperkuat fondasi E-Government di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan tingkat kesiapan teknologi atau E-Readiness menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari aplikasi E-Kinerja dapat dioptimalkan sepenuhnya, sesuai dengan tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang diharapkan dari sistem ini. Dalam konteks penerapan aplikasi E-kinerja, digunakanlah framework STOPE sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan inisiatif E-Government. Framework STOPE, yang mengidentifikasi lima faktor utama yaitu strategi, teknologi, organisasi, manusia, dan lingkungan, memberikan panduan yang komprehensif dalam memastikan bahwa implementasi aplikasi ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mendukung keberhasilan dari segi strategis dan organisasional.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini, bagaimana tingkat kesiapan (E-Readiness) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di Kabupaten Gowa terhadap

penerapan Aplikasi E-kinerja? Rencana penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kesiapan (E-Readiness) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di Kabupaten Gowa terhadap penerapan aplikasi E-Kinerja menggunakan framework STOPE dengan lima elemen yaitu strategi, teknologi, organisasi, manusia, dan lingkungan sebagai indikator penilaian. Penelitian ini akan menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi selama proses penerapan aplikasi E-kinerja, serta strategi dan solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Peran pelatihan dan pendampingan dalam membantu pegawai memahami dan menggunakan aplikasi E-Kinerja secara efektif juga akan dieksplorasi. Dengan memadukan inovasi teknologi aplikasi E-kinerja dan pendekatan sistematis dari framework STOPE, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam manajemen kinerja ASN serta pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“E-READINESS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB DALAM IMPLEMENTASI E-KINERJA”**.

I.2 Tinjauan Teori

Peneliti selanjutnya meninjau berbagai teori yang dapat menjelaskan dan mengukur tingkat kesiapan (E-Readiness) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam penerapan aplikasi elektronik kinerja. Dari teori-teori yang ditinjau, peneliti memilih satu teori yang paling sesuai untuk menjelaskan fenomena yang diangkat. Teori terpilih ini akan digunakan untuk menganalisis kesiapan pengadilan dalam penerapan aplikasi tersebut.

Pertama yakni Framework STOPE oleh Al-osaimi, K., Alheraish, A., & Bakry, S. H (2006) merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan suatu organisasi dalam mengimplementasikan inisiatif E-Government. Kerangka kerja ini mencakup lima indikator yaitu strategi, teknologi, organisasi, manusia, dan lingkungan:

a) Strategi

Strategi adalah langkah pertama dalam penerapan E-Government, melibatkan perencanaan dan pengembangan strategi yang jelas dan spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan E-Government tidak hanya memerlukan rencana strategis yang komprehensif tetapi juga strategi yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Strategi harus tidak hanya menetapkan tujuan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan visi jangka panjang untuk transformasi digital. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB perlunya pengembangan rencana strategis yang komprehensif untuk mencapai tujuan transformasi digital organisasi, juga kemampuan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan teknologi dan kebutuhan masyarakat serta identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas dalam penerapan teknologi, terakhir pengembangan kebijakan yang mendukung adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi.

b) Teknologi

Komponen-komponen inilah yang memungkinkan penerapan E-Government, seperti infrastruktur teknis, sistem informasi, dan aplikasi yang tepat untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Aspek teknologi dalam Framework STOPE mencakup tidak hanya infrastruktur dan sistem informasi, tetapi juga integrasi teknologi yang dapat mendukung interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pemilihan infrastruktur yang skalabel dan fleksibel dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan yang responsif dan terjangkau. Selain itu, implementasi aplikasi yang terintegrasi dengan sistem yang ada juga penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

c) Organisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi E-Government antara lain struktur organisasi yang jelas, peran dan tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan upaya E-Government. Organisasi yang sukses dalam menerapkan E-Government perlu memiliki struktur yang adaptif dan kultur kerja yang mendukung inovasi. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB aspek organisasional mencakup penyesuaian struktur, peran, dan proses kerja untuk mendukung transformasi digital. Hal ini meliputi pengembangan kelembagaan yang memfasilitasi kolaborasi lintas departemen, pemberdayaan tim implementasi E-Government, dan penerapan prinsip manajemen perubahan untuk mengatasi resistensi organisasional.

d) Manusia

Hal ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan motivasi pegawai dalam memanfaatkan teknologi dan mengembangkan inisiatif E-Government, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan E-Government. Faktor manusia menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi E-Government. Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sendiri pentingnya pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menghadapi tantangan teknologi baru dan penggunaan alat-alat digital. Inisiatif pelatihan dan pendidikan kontinu diperlukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta untuk mengubah paradigma kerja menuju pelayanan yang lebih berorientasi pada masyarakat. Motivasi pegawai juga menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam memastikan adopsi teknologi yang maksimal.

e) Lingkungan

Dalam hal ini kebijakan, undang-undang, dan budaya organisasi yang mendukung dan memandu implementasi E-Government merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi E-Government. Lingkungan kebijakan dan budaya organisasi memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung transformasi digital. Keberhasilan implementasi E-Government di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dipengaruhi oleh kerangka hukum yang jelas, regulasi yang mendukung, dan budaya organisasi yang inovatif. Selain itu, partisipasi aktif dari pemangku kepentingan eksternal, seperti masyarakat sipil dan sektor swasta, juga penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi baru.

Framework STOPE menjadi rujukan di beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Rini Mayasa, Nono Heryana dan Agustia Hananto (2023) *Village Government Readiness Toward the Adoption of E-Government.*, José Esteves, Rhoda C. Joseph (2008) *A comprehensive framework for the assessment of eGovernment projects.*, Hyeri Choi, Min Jae Park, Jae Jeung Rho, dan Hangjung (2016) *Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system.*

Kedua Teori Menurut Alghamdi et al., (2011) didasarkan pada perspektif organisasi pada aspek-aspek yang terkait dengan E-Government. Mereka menyarankan bahwa pertimbangan strategis seperti memeriksa biaya, mengukur tingkat pencapaian visi dan tujuan, dan mengidentifikasi potensi tantangan terkait teknologi dan kebijakan online adalah penting ketika menganalisis kesiapan elektronik. Kerangka penilaian kesiapan elektronik terintegrasi yang mencakup tujuh dimensi:

- a) Program
Dimensi ini mencakup rencana strategis dan kebijakan yang ada dalam organisasi terkait penerapan sistem elektronik. Hal ini menilai seberapa baik perencanaan organisasi dan seberapa jelas visi dan tujuan programnya. Proses dan Sistem Informasi, Melibatkan penilaian terhadap proses bisnis yang ada dalam organisasi dan sejauh mana sistem informasi yang terintegrasi akan mendukung dan meningkatkan efisiensi proses-proses ini.
- b) Strategi
Hal ini berfokus pada seberapa baik suatu organisasi dapat mengembangkan strategi yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan sistem elektronik, termasuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
- c) Arsitektur
Mengacu pada desain keseluruhan sistem elektronik yang diterapkan, termasuk kompatibilitas antara komponen sistem dan konsistensi arsitektur dengan kebutuhan organisasi.
- d) Infrastruktur
Menilai kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang diperlukan untuk mendukung sistem elektronik terintegrasi.
- e) Akses Pengguna
Mengevaluasi aksesibilitas pengguna dalam menggunakan sistem elektronik, termasuk antarmuka pengguna yang intuitif dan dukungan pelatihan dan bantuan pengguna.
- f) Sumber Daya Manusia
Aspek ini mencakup penilaian terhadap keterampilan, pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam penggunaan dan pengelolaan sistem elektronik baru, serta dukungan manajemen dan kebijakan yang ada terkait pengembangan sumber daya manusia.

Teori ini telah menjadi rujukan di beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Sudesh Sheoran, Sanket Vij (2022) *A Review of E-Government Assessment Frameworks: E-Readiness, Adoption, Citizen Engagement and Quality.*, Eyad Makki, Lin-Ching Chang (2015) *E-Commerce Acceptance and Implementation In Saudi Arabia: Previous, Current And Future Factors.*, Serta dalam buku Tjiptono (2016) dengan judul "Service, Quality, dan Satisfaction".

Teori selanjutnya adalah E-Government Readiness menurut Wisnujaya dan Surendro (2006), analisis kesiapan E-Government dibagi menjadi dua bidang, yaitu kesiapan E-Government dari sudut pandang pemerintah (government E-Readiness) dan dari sudut pandang pengguna/warga negara. Faktor-faktor yang berhubungan dengan government E-Readiness meliputi:

- a) E-leadership, faktor ini terkait dengan prioritas dan inisiatif pimpinan. E-leadership sangat berpengaruh dalam implementasi E-Government di tingkat desa.
- b) Culture, faktor ini menyangkut penerimaan individu/aparat pemerintah dalam menggunakan teknologi. Penerimaan teknologi oleh pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam implementasi E-Government.
- c) Human resources, aspek ini menyangkut kemampuan kognitif dan kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi. Keterampilan teknis dan kemampuan kognitif sangat diperlukan dalam implementasi E-Government.
- d) E-governance, aspek yang menyangkut tata kelola E-Government. Tata kelola yang efektif dan transparan sangat penting dalam implementasi E-Government.
- e) ICT infrastructure, aspek ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam implementasi E-Government.
- f) Business climate, Aspek ini terkait dengan kondisi pasar, regulasi, dan sistem pasar yang berhubungan dengan ketersediaan hardware dan software. Kondisi pasar yang stabil dan regulasi yang jelas sangat penting dalam implementasi E-Government.

Teori ini digunakan sebagai rujukan dalam penelitian, salah satunya dari Anton Susanto (2011) *Analisis Citizen e-Readiness dalam Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Puslitbang Aptika & IKP Balitbang SOM Kominfo.

Terakhir teori E-Government (Richardus Eko Indrajit 2006), teori ini menjelaskan E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam salah satu konsepnya yaitu electronic government model G2E diterapkan dengan tujuan agar hubungan pemerintah yang diterapkan pada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja yang transparan, berkualitas, efisien dan efektif. Indikatornya mencakup beberapa hal yaitu:

- a) Transparansi, Informasi yang disajikan secara online dan dapat diakses oleh ASN, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi ASN dalam proses pengambilan Keputusan.
- b) Kualitas, Sistem E-Government yang memungkinkan ASN untuk mengakses informasi dan layanan secara online, meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan data.
- c) Efisiensi, Sistem E-Government yang memungkinkan ASN untuk melakukan transaksi dan mengakses informasi secara online, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan waktu dan biaya.
- d) Efektivitas, Sistem E-Government yang memungkinkan ASN untuk mengakses informasi dan layanan secara online, meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.

Teori ini sudah menjadi rujukan di beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rusdi, Roni Ekha Putera, Kusdarini (2022) Analisis E- Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di Dpmptsp Kota Padang. Kartika Setianingrum, H. I Nyoman Sumaryadi, dan Ella Wargadinata (2020) Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dwibi Ramdhaniah Dismar dan Firman (2019) Evaluasi Kebijakan Sistem E-Kinerja Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

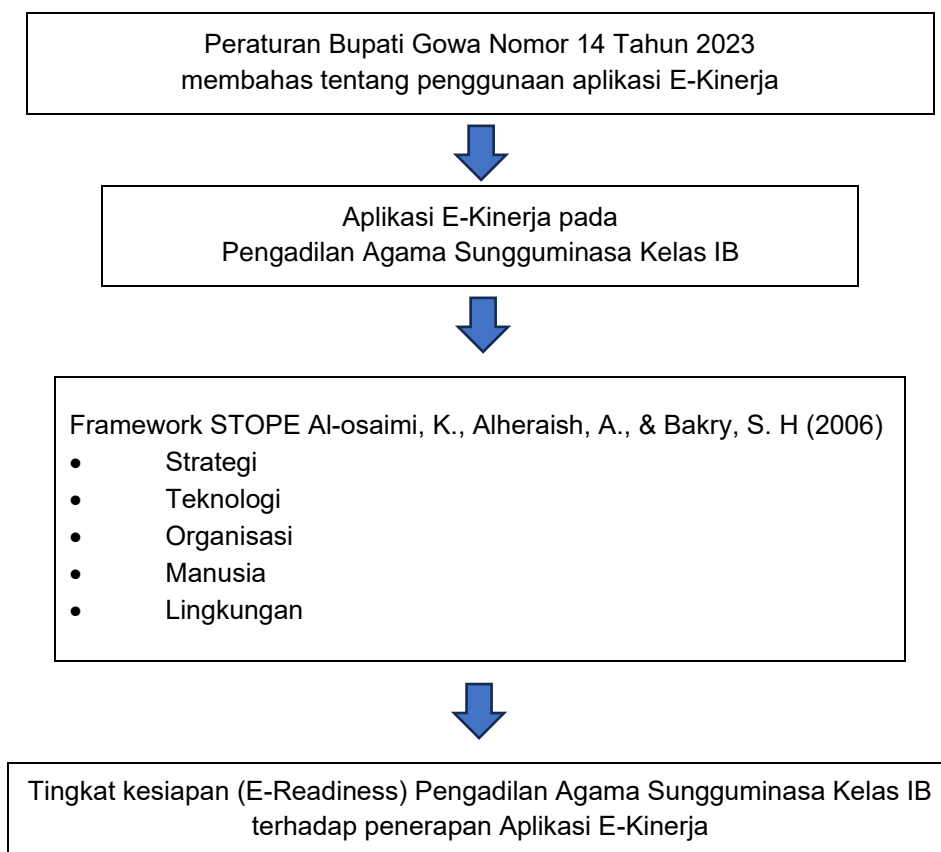
Untuk memudahkan penelitian mengenai tingkat kesiapan dalam penerapan aplikasi E-kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagaimana panduan serta memberikan batasan terhadap penelitian ini sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik. Aplikasi E-kinerja merupakan terobosan signifikan dalam manajemen kepegawaian yang mencakup pembuatan sasaran kinerja pegawai (SKP), pelaksanaan SKP, dan proses penilaian prestasi kinerja yang terintegrasi secara online. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja, izin kerja, dan pengelolaan keuangan.

Dengan memanfaatkan framework STOPE sebagai panduan, diharapkan dapat tercipta integrasi yang efektif antara teknologi informasi dan kebutuhan manajerial dalam implementasi aplikasi E-kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Hal ini akan mendukung pencapaian sasaran aplikasi E-kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja ASN serta memastikan penerapan standar yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Framework STOPE, yang merupakan kerangka kerja terstruktur, menyediakan pendekatan komprehensif untuk mengevaluasi kesiapan suatu organisasi dalam mengadopsi inisiatif E-Government.

Framework ini mengidentifikasi lima faktor krusial yaitu strategi, teknologi, organisasi, manusia, dan lingkungan. Kelima faktor ini tidak hanya menjadi landasan dalam menilai kesiapan suatu inisiatif E-Government, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengukur yang ideal bagi peneliti untuk mengevaluasi tingkat kesiapan (E-Readiness)

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam penerapan aplikasi E-kinerja. Pemilihan framework STOPE sebagai landasan evaluasi karena kesesuaian filosofi dan tujuan aplikasi E-kinerja dalam konteks pengembangan ASN di instansi peradilan. Framework STOPE merupakan sarana yang tepat untuk mengukur tingkat kesiapan (E-Readiness) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB terhadap penerapan aplikasi E-Kinerja. Berikut kerangka konseptual tersebut digambarkan:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti (2024)

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di Kabupaten Gowa dalam penerapan aplikasi E-Kinerja, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini, serta mengevaluasi strategi dan solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, menggunakan framework STOPE dengan lima elemennya yaitu strategi, teknologi, organisasi, manusia, dan lingkungan sebagai indikator penilaian:

- a) Strategi pelaksanaan dan pengembangan penerapan aplikasi E-Kinerja pada

- Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- b) Teknologi, dalam hal ini infrastruktur teknis dan sistem informasi, yang digunakan dalam penerapan aplikasi E-Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
 - c) Organisasi, yaitu struktur birokrasi yang adaptif dan kultur kerja dalam penerapan aplikasi E-Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
 - d) Manusia, yaitu keterampilan pegawai serta pengembangan pegawai dalam mengadopsi teknologi, yaitu aplikasi E-Kinerja, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
 - e) Lingkungan, dalam hal ini budaya birokrasi serta transformasi digital budaya birokrasi, dalam penerapan aplikasi E-Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

I.3.2 Manfaat

Manfaat penelitian ini mencakup beberapa aspek

- a) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang tingkat kesiapan (E-Readiness) teknologi dalam sektor publik, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama.
- b) Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dan instansi serupa untuk meningkatkan kesiapan penggunaan aplikasi E-Kinerja.
- c) Dari segi kebijakan, penelitian ini dapat menyediakan masukan bagi Kementerian PANRB dan pengambil kebijakan lainnya dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan terkait aplikasi E-Kinerja dan teknologi informasi di sektor publik.

BAB II METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang berupaya memahami permasalahan manusia dan sosial berdasarkan tradisi penelitian dengan menggunakan metode unik untuk menyelidikinya. Peneliti membuat gambaran holistik yang kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci, dan melakukan penelitian di lingkungan alam (Creswell 2019: 29). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu peneliti mengumpulkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi di organisasi kemudian mengolahnya, dengan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di JL. Masjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa terhadap penerapan aplikasi penilaian kinerja elektronik (E-Kinerja).

II.1.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tingkat kesiapan (E-Readiness) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di Kabupaten Gowa terhadap penerapan aplikasi E-Kinerja menggunakan framework STOPE dengan lima elemen yaitu strategi, teknologi, organisasi, manusia, dan lingkungan sebagai indikator penilaian oleh Al-osaimi, K., Alheraish, A., & Bakry, S. H (2006):

- a) Strategi mengintegrasikan faktor-faktor yang berkaitan dengan tujuan kedepan, komitmen dan rencana terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Isu yang dianggap terkait dengan ini: Strategi pelaksanaan dan pengembangan dalam penerapan aplikasi E-Kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- b) Teknologi mengintegrasikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan isu terkait fasilitas teknologi informasi saat ini. Isu yang dianggap terkait dengan ini: Infrastruktur teknis dan sistem informasi yang digunakan dalam penerapan aplikasi E-Kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- c) Organisasi mengintegrasikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan isu terkait transformasi birokrasi menuju organisasi yang adaptif. Isu yang dianggap terkait dengan ini: Struktur birokrasi yang adaptif dan budaya/kultur kerja dalam penerapan aplikasi E-Kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- d) Manusia mengintegrasikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan isu terkait pengguna dan keterampilan. Isu yang dianggap terkait dengan ini: Keterampilan pegawai dan pengembangannya dalam mengadopsi teknologi, khususnya aplikasi E-Kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- e) Lingkungan mengintegrasikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan saat ini isu-isu dasar yang mempengaruhi keadaan saat ini. Isu yang dianggap terkait dengan ini budaya birokrasi dan transformasi digital dalam budaya birokrasi terkait dengan penerapan aplikasi E-Kinerja di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

II.2 Desain Penelitian

Penelitian studi kasus merupakan penelitian empiris yang mengkaji fenomena kehidupan nyata (Bungin 2001). Tidak ada perbedaan yang jelas antara fenomena dan konteks permasalahan (Herdiansyah 2010). Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena E-Readiness dalam konteks tertentu, yaitu penerapan aplikasi E-Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di Kabupaten Gowa. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman rinci tentang proses, tantangan, dan strategi yang digunakan pegawai ketika menghadapi perubahan.

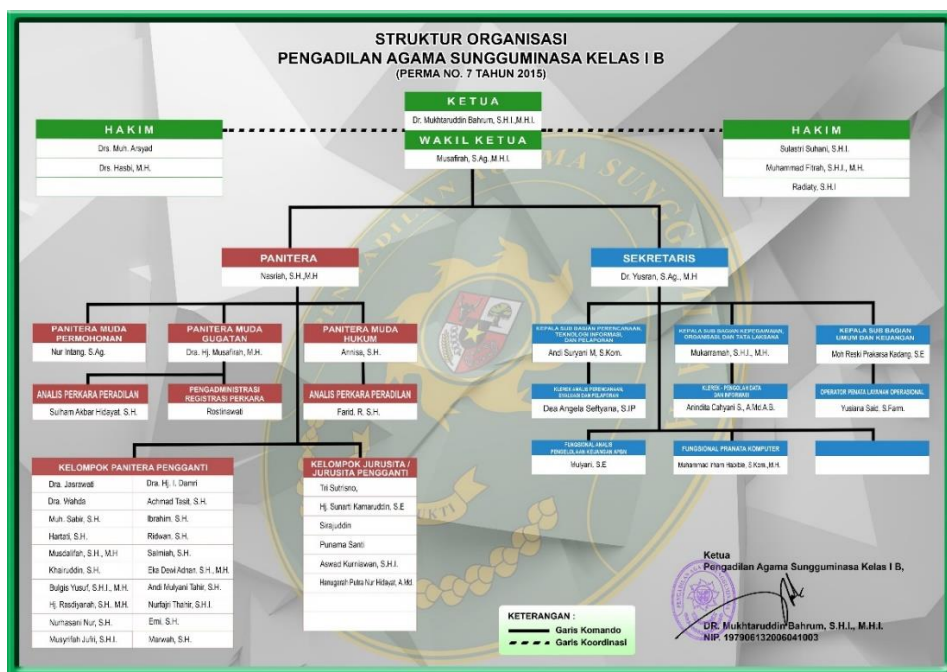
II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Pemilihan Informan merupakan orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh didasarkan pada kualitas, keandalan, dan kekayaan informasi yang dimilikinya. Informan penelitian ini terdiri atas:

- a) Hakim
- b) Panitera
- c) Sekretaris
- d) Pejabat Struktural
- e) Pejabat Fungsional
- f) Staf Pengelola/Pelaksana

Gambar 2. Struktur Organisasi



Sumber: Website Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB (2017)

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk:

- a) Wawancara
Merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan (Zuriah 2009). Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan strategi mereka terhadap E-Kinerja.
- b) Observasi
Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah 2009). Observasi akan dilakukan secara partisipatif di lingkungan kerja untuk mengamati praktik sehari-hari pegawai dalam menggunakan E-Kinerja dan interaksi mereka dengan sistem tersebut.
- c) Dokumentasi
Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah 2009). Dokumen- dokumen terkait penerapan E-Kinerja, kebijakan organisasi, dan komunikasi internal akan dianalisis untuk mendapatkan konteks lebih lanjut tentang tingkat kesiapan (E-Readiness) sistem dan dampaknya pada pegawai.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Menurut (Miles, 2014) terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yaitu:

- a) Reduksi data (Data reduction)
Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.
- b) Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa rangkuman sederhana, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, data seringkali disajikan dalam bentuk teks deskriptif, ada yang dilengkapi dengan grafik, matriks, gambar, dan lain-lain.
- c) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)
Dalam penelitian kualitatif diperoleh penemuan-penemuan baru sebagai hasil akhir dari hasil penelitian. Pengetahuan baru ini dapat berupa deskripsi atau statistik benda-benda yang sebelumnya tidak jelas keberadaannya. Hal ini dikarenakan pengetahuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu benda yang tadinya tidak jelas atau gelap, dan setelah dipelajari menjadi jelas berbentuk (Sugiyono 2012) Ini mungkin hubungan sebab akibat atau interaksional, hipotesis atau teori.
- d) Metode STOPE yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori tingkat kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam implementasi

aplikasi E-kinerja. Kategori yang digunakan adalah: kategori tidak siap jika seluruh variable STOPE belum mampu mengadopsi dan menggunakan aplikasi E-kinerja, kategori cukup jika salah satu variabel STOPE belum mampu mengadopsi dan menggunakan aplikasi E-kinerja dan kategori siap jika seluruh variable STOPE sudah mampu mengadopsi dan menggunakan aplikasi E-kinerja.

II.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut pula dengan *trustworthiness*, *authenticity*, dan *credibility* Creswell (dalam Susanto, 2013). Penelitian ini menggunakan uji triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data (Moleong, 2014).

Peneliti kemudian melakukan triangulasi sumber data untuk mengatasi penyimpangan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian terkait E-Readiness Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB terhadap penerapan aplikasi E-kinerja. Triangulasi Sumber Data yaitu data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali bersama informan untuk dilihat kebenaran informasinya kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dicari mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Dilakukan pengecekan data kepada narasumber lain yang paham akan masalah yang diteliti.

Reliabilitas Data dalam (Sugiyono 2016:364) menjelaskan bahwa realibilitas berhubungan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Ia juga menjelaskan dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara laporan yang diteliti dan kenyataan yang terjadi pada penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pada uji realibilitas laporan penelitian harus jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas akan hasil penelitian yang dalam hal ini adalah hasil penelitian terkait E-Readiness Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB terhadap penerapan aplikasi E-kinerja.